



KOMUNIKASI POLITIK DALAM PEMILIHAN PIMPINAN DPR RI

Ahmad Budiman*)

Abstrak

Pemilihan pimpinan DPR RI masuk dalam kajian bidang masalah komunikasi politik. Kegiatan pemilihan pimpinan DPR RI menjadi bentuk praktik komunikasi satu arah. Praktik ini berpotensi terbentuknya persepsi negatif masyarakat yang tercermin dari umpan balik pesan masyarakat yang berupa kritikan, sindiran, kekecewaan meski ada juga kekaguman. Perlu upaya yang sistematis untuk membangun kembali citra politik DPR RI melalui penyediaan mekanisme komunikasi dua arah antara DPR RI dan masyarakat.

Pendahuluan

Pemilihan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2014-2019, pada Rapat Paripurna ke-2 (dua) di DPR RI telah berlangsung beberapa waktu lalu. Pada Rapat Paripurna tersebut berulang kali anggota DPR RI yang baru dilantik mendatangi meja pimpinan sementara DPR RI memprotes jalannya rapat yang dinilai tidak demokratis. Anggota DPR RI, terutama dari Fraksi PDI-Perjuangan merasa hak bicaranya dibungkam selama rapat. Berulang kali interupsi dilakukan namun tidak satu pun digubris ketua rapat. Empat partai politik (parpol) yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) akhirnya memutuskan walk out saat memasuki agenda penyampaian usul paket pimpinan DPR RI.

Paket pimpinan DPR RI yang diajukan Koalisi Merah Putih (KMP) terpilih secara aklamasi oleh enam parpol yang masih bertahan hingga berakhirnya Rapat Paripurna pemilihan Pimpinan DPR RI. Bendahara Partai Golkar, Setya Novanto terpilih sebagai Ketua DPR RI periode 2014-2019 didampingi 4 (empat) wakil ketua yaitu, Fadli Zon (Partai Gerindra), Agus Hermanto (Partai Demokrat), Taufik Kurniawan (PAN), dan Fahri Hamzah (PKS).

Pemilihan pimpinan DPR RI memang telah

menarik perhatian dan penilaian banyak pihak di negeri ini. Perilaku anggota DPR RI yang terlibat di dalamnya, telah menjadi stimulus bagi setiap orang untuk memberikan respons atau reaksi terhadap proses pemilihan pimpinan DPR RI. Pakar politik dari Universitas Gajah Mada, Ari Dwipayana, menilai proses pemilihan pimpinan DPR RI dari KMP membuat polarisasi politik antara pemerintah dan parlemen semakin tajam. Padahal secara normatif DPR RI bertugas mengontrol pemerintahan dalam rangka *checks and balances*. Kita berharap DPR RI tidak membuat pemerintahan jadi lumpuh akibat kontrol yang melampaui koridor.

Pakar politik dari LIPI, Siti Zuhro, mengingatkan kubu Jokowi tak perlu khawatir dengan komposisi pimpinan DPR RI. Sebab, kabinet kerja yang diwacanakan Jokowi lebih banyak memihak kepentingan rakyat banyak. Meskipun demikian, komposisi pimpinan DPR RI menjadi cermin arah relasi DPR RI dan pemerintah ke depan. Jika pimpinan DPR RI dikuasai KMP, berpotensi menjadi sandungan bagi pemerintah ke depan.

Pemilihan pimpinan DPR RI juga menjadi perhatian media massa. Setidaknya hasil reportase media massa mengenai pemilihan pimpinan DPR

*) Peneliti Madya Komunikasi Politik pada Bidang Politik Dalam Negeri, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, E-mail: a.budiman69@gmail.com.



Tabel 1. Judul Berita Media Massa Terkait Pemilihan Ketua DPR RI Periode 2014-2019

No	Tanggal	Media Massa	Judul Berita Utama
1	2-10-2014	Republika	PDIP Lepas Pimpinan DPR
2	2-10-2014	http://www.tribunnews.com/nasional/2014/10/02/interupsi-dicueki-pimpinan-sidang-pemilihan-ketua-dpr-ricuh , diakses tanggal 7-10-2014	Interupsi Diciekin Pimpinan, Sidang Pemilihan Ketua DPR Ricuh
3	2-10-2014	http://www.solopos.com/2014/10/02/pemilihan-pimpinan-dpr-walk-out-koalisi-pdip-tak-pengaruh-keabsahan-putusan-sidang-540990 , diakses tanggal 7-10-2014	Walk Out Koalisi PDIP Tak Pengaruhi Keabsahan Putusan Sidang
4	2-10-2014	http://www.tempo.co/read/news/2014/10/02/078611335/Sidang-DPR-Ada-Teriakan-sampai-Kepalan-Tangan , diakses tanggal 7-10-2014	Sidang DPR, Ada Teriakan sampai Kepalan Tangan
5	2-10-2014	Media Indonesia	Pimpinan DPR Harus Bebas Korupsi
6	2-10-2014	Rakyat Merdeka	Pertemuan Jokowi-SBY Tidak Mengubah Peta DPR
7	2-10-2014	Suara Pembaruan	Mega dan SBY Tak Rujuk, Novanto Jadi Ketua DPR
8	3-10-2014	Rakyat Merdeka	Keresahan Di Dunia Usaha Pengusaha Minta Politik Kuat-Kuatan Diakhiri

Sumber: dari berbagai media massa.

RI tercermin dari judul berita utama, sebagaimana dijabarkan dalam tabel 1 berikut.

Pemberitaan oleh media massa, selain menyajikan kegiatan rapat paripurna juga menyajikan pernyataan komunikator politik (anggota DPR RI) yang terlibat dalam kegiatan pemilihan pimpinan DPR RI. Pernyataan komunikator politik terkait masalah ini, di antaranya yaitu:

1. Adian Napitupulu (PDIP) menilai kesalahan itu terjadi karena pimpinan sementara DPR RI yang memimpin rapat konsultasi yaitu Popong Otje Djundjuran (Partai Golkar) dan Ade Rizki Pratama (Partai Gerindra) meninggalkan rapat konsultasi terburu-buru setelah mengetuk palu atas sembilan agenda rapat paripurna tanpa sebelumnya menutup rapat konsultasi.
2. Puan Maharani (PDIP) merasa suara dari anggota Fraksi PDI Perjuangan tidak dihargai dalam setiap persidangan. Ini adalah pengambilan keputusan yang seandainya saja. Tak menghargai dan tak berlandaskan asas musyawarah mufakat.
3. Bachtiar Aly (Nasdem) yang sudah berdiri di podium, memberikan ceramah singkat bagaimana anggota DPR RI bersikap dan etika komunikasi yang sopan.
4. Daniel Johan (PKB) menilai Rapat paripurna yang diharapkan menjadi arena mempertemukan berbagai gagasan dan pendapat, serta pengambilan keputusan yang aspiratif dan demokratis, ternyata hanya menjadi ajang mematikan keberagaman aspirasi dan membungkam demokrasi.
5. Ketua DPR RI, Setya Novanto, pada pidato pertamanya diantaranya mengatakan, "Sebagai wakil rakyat terpilih Insya Allah kita akan menjalankan tugas untuk kurun waktu lima tahun mendatang sejak tanggal 2 Oktober 2014 hingga 30 September 2019. Kami sebagai Ketua dan wakil-wakil ketua akan menjalankan kewajiban dan akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan berdemokrasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, daripada kepentingan pribadi, seseorang dan golongan."

Tabel 2. Respons Masyarakat di Media *Twitter* terhadap Pemilihan Pimpinan DPR RI Periode 2014-2019

No	Tanggal	Media Massa	Judul Berita Utama
1	3-10-2014	@FauzIqbal	Gedung DPR bisa jadi lokasi simulasi anti huru-hara oleh Polri nih
2	3-10-2014	@Rinto114	Saya menilai, yang terjadi semalam di ruang sidang DPR sungguh memalukan dan kumpungan. Dan itu realitas politik di tanah air.
3	3-10-2014	@JayaYea	Itu tadi yang mijit-mijit Bu Ketua sopo yo? Kok gak sopan blass
4	3-10-2014	@panglimaAdil	Dipilih rakyat untuk berbicara atas nama rakyat tapi tidak (boleh) bicara atas nama rakyat
5	3-10-2014	@banyubiru	Selamat bagi anggota DPR baru. Semoga kata "Yth" sebagai panggilan anda dapat dipertahankan dengan bekerja untuk rakyat beneran
6	3-10-2014	@4rfan	Anak-anak SD dalam pemilihan ketua kelas ga ada yang ricuh tuh
7	3-10-2014	@Mpu Jaya Prema	Semoga lebih arif dan mengurangi kata-kata kotor supaya tak ditiru cucu-cucu saya. Tak ada terlambat untuk berbuat baik
8	3-10-2014	@dedeKendor	Pimpinan sidang kehilangan palu, anggota kehilangan malu
9	3-10-2014	@90_Taufiq	Ceu Popong jadi pahlawan DPR. Di tengah ricuhnya suasana rapat, dia tetap menjalankan tugasnya sebagai pimpinan
10	3-10-2014	@Rasyid2909	Sebagai anggota DPR tertua, Ceu Popong sudah 5 periode jadi anggota DPR, kelihatan banget sudah berpengalaman

Sumber: Surat Kabar Rakyat Merdeka, 3-10-2014

Masyarakat juga memberikan respons terhadap proses pemilihan pimpinan DPR RI. Setidaknya respons masyarakat tersebut tercermin dari isi tulisannya di media sosial *twitter*, seperti yang disajikan pada tabel 2 diatas.

Isi pesan pada media *twitter* mengenai pemilihan pimpinan DPR RI, dapat diidentifikasi pada dua identifikasi penilaian masyarakat yaitu terhadap kelembagaan DPR RI dan perilaku anggota DPR RI. *Tone* isi pesannya dikategorikan pada sindiran, kritikan kekecewaan, dan kekaguman. Proses kegiatan pemilihan pimpinan DPR RI, beberapa diantaranya bahkan sempat menjadi *trending topic* yang menyita perhatian penggiat media sosial *twitter*.

Deskripsi proses pemilihan pimpinan DPR RI jelas berkaitan dengan DPR RI secara kelembagaan dan termasuk juga Anggota DPR RI sebagai pemberi pesan. Media massa menyajikan hasil reportasenya sekaligus membentuk agenda setting di masyarakat. Masyarakat sebagai penerima pesan memberikan respons baik secara langsung maupun menggunakan media massa. Semua komponen yang berkaitan dengan proses pemilihan pimpinan DPR RI, sesungguhnya berada dalam sebuah proses komunikasi politik sehingga menjadi penting untuk ditelaah lebih mendalam.

Perspektif Komunikasi Politik

Secara filosofis, kajian komunikasi politik adalah kajian tentang hakikat kehidupan manusia untuk mempertahankan hidup dalam lingkup berbangsa dan bernegara. Kajian komunikasi politik bersifat dimensional dan kasuistik karena berkaitan dengan berbagai macam problem dan kompleksitas permasalahan. Tidak hanya berkisar pada pembahasan proses komunikasi yang memuat pesan-pesan politik, tetapi juga membahas bagaimana komunikasi dapat berlangsung dalam suatu sistem politik atau sistem pemerintahan yang mencakup bahasan-bahasan bagaimana sistem itu dapat dipertahankan dan dapat berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Istilah komunikasi politik menurut pakar komunikasi Andi Muis (1990) menunjuk pada pesan sebagai objek formalnya sehingga titik berat konsepnya terletak pada komunikasi dan bukan pada politik. Pada hakekatnya komunikasi politik mengandung informasi atau pesan tentang politik. Dari perspektif yang berbeda Dan Nimmo (1999) juga memberikan formulasi komunikasi politik. Dengan memandang inti komunikasi sebagai proses interaksi sosial dan inti politik sebagai konflik sosial, Nimmo merumuskan bahwa komunikasi politik sebagai kegiatan yang bersifat politis atas dasar konsekuensi aktual dan potensial yang menata perilaku dalam kondisi konflik.

Pendekatan konseptual ini, semakin meyakinkan bahwa proses pemilihan pimpinan DPR RI merupakan bidang kajian masalah komunikasi politik. Kegiatan maupun perilaku komunikator politik menghasilkan pesan politik yang diliput dan diberitakan media massa kemudian direspons oleh masyarakat sebagai komunikan politik. Masalahnya, apakah keseluruhan proses kegiatan pemilihan pimpinan DPR RI dapat dikatakan merupakan implementasi komunikasi politik yang efektif yang tujuan akhirnya adalah menata perilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara?

Jawabannya, perlu mendekatkan realita proses kegiatan pemilihan pimpinan DPR RI kepada praktek komunikasi politik yang menurut Fisher (1990: 139-320) pada hakikatnya mengenal 4 (empat) paradigma yaitu paradigma mekanistik, paradigma psikologis, paradigma interaksional, dan paradigma pragmatis. Secara ideal praktek komunikasi politik menjalankan paradigma interaksional.

Paradigma interaksional menyatakan bahwa komunikasi dikonseptualisasikan sebagai interaksi manusiawi pada masing-masing individu yang berkomunikasi. Interaksi ini sering disamakan dengan bentuk komunikasi dua arah antara komunikator dengan komunikan yang dibangun secara manusiawi. Itu artinya, kegiatan komunikasi politik melalui paradigma interaksional ini paling tepat bila digunakan dalam rangka pelaksanaan fungsi dan wewenang Dewan yang wajib melakukan komunikasi dua arah dalam kerangka representasi rakyat.

Sedangkan paradigma pragmatis memusatkan perhatian pada pragma atau tindakan. Tindakan tersebut dapat berupa ucapan, tindakan atau perilaku. Pada paradigma pragmatis orientasi ditujukan kepada perilaku komunikator saja dalam suatu sistem sosial. Tindakan atau perilaku komunikator merupakan bentuk komunikasi dan inilah yang terjadi pada praktik komunikasi politik pemilihan pimpinan DPR RI.

Perdebatan politik yang dilakukan komunikator politik (anggota DPR RI) yang terjadi pada Rapat Paripurna dan disajikan lewat media massa, berlangsung kurang baik sehingga menimbulkan pemberitaan dan respons negatif di media massa. Pada sisi yang lain, komunikan politik sayangnya tidak dapat memberikan umpan balik atas pesan politik yang disampaikan komunikator politik dan diberitakan melalui media massa tersebut. Kondisi itu disebabkan kegiatan pemilihan pimpinan DPR RI memang tidak memberikan kesempatan kepada komunikan berupa mekanisme penerimaan umpan balik.

Ini pula yang menyebabkan umpan balik komunikan politik, *tone* pesan politik lebih mengarah kepada kritikan, sindiran, kekecewaan, meskipun ada juga berisi kekaguman. Sedangkan saluran komunikasi yang digunakan terbatas hanya menggunakan media massa dan atau media sosial. Komunikasi politik yang dibangun dari kegiatan pemilihan pimpinan DPR RI menjadi bentuk komunikasi satu arah, karena interaksi komunikator politik dengan komunikan politik terjadi melalui saluran komunikasi yang berbeda dengan sudut pandang pesan politik yang berbeda pula.

Kondisi ini berpotensi menyebabkan terbentuknya persepsi negatif dari masyarakat terhadap keseluruhan kegiatan proses pemilihan pimpinan DPR RI. Citra politik DPR RI baik secara kelembagaan maupun anggota DPR RI menjadi semakin menurun karena hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap DPR RI sebagai lembaga perwakilan. Perlu upaya yang sistematis untuk membangun kembali citra politik DPR RI.

Membangun Citra Politik

Tujuan komunikasi politik adalah membentuk citra politik yang baik bagi komunikan. Citra politik terbentuk berdasarkan informasi yang diterima komunikan, baik langsung maupun melalui media politik, termasuk interaksi melalui media sosial. Citra politik tersusun melalui persepsi komunikan yang bermakna tentang pesan politik (kegiatan dan tokoh) dan kemudian menyatakan makna itu melalui kepercayaan, nilai, dan pengharapan dalam bentuk pendapat pribadi yang selanjutnya dapat berkembang menjadi pendapat umum.

Untuk itu menjadi penting diingat bahwa pada hakikatnya suatu strategi dalam komunikasi politik adalah keseluruhan keputusan kondisional pada saat ini tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan politik pada masa depan. Justru itu, merawat ketokohan dan memantapkan kelembagaan politik akan merupakan keputusan yang paling tepat bagi komunikator politik untuk membangun citra politik sebagai tujuan politik di masa depan.

Citra adalah kesan yang timbul karena pemahaman akan suatu kenyataan. Pemahaman itu sendiri muncul karena adanya informasi. Tugas DPR RI pada masa selanjutnya adalah membangun dan atau menegakkan citra kelembagaan perwakilan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan tidak melahirkan isu-isu yang dapat merugikan.

Tetap konsisten untuk menerapkan paradigma interaksional pada kegiatan komunikasi politik dengan cara mengembangkan komunikasi dua arah oleh DPR RI kepada seluruh masyarakat, merupakan pilihan yang paling tepat. Komunikasi dua arah harus selalu digunakan dalam rangka pelaksanaan fungsi dan wewenang Dewan dalam kerangka representasi rakyat.

Seberapa jauh citra akan terbentuk sepenuhnya ditentukan oleh bagaimana DPR RI mampu membangun persepsi yang didasarkan realitas yang terjadi (Persepsi-Realitas-Citra, PRC). Apalagi kalau realitas diselewengkan untuk mengelabui target audience sehingga memunculkan persepsi sesuai dengan apa yang kita inginkan. PRC dibangun dengan fondasi kredibilitas. PRC yang tidak didasari informasi realitas dengan kredibilitas tinggi hanya akan menghasilkan citra yang lemah. Risiko yang diakibatkan oleh informasi yang tidak kredibel adalah banyak celah yang bisa dilihat oleh publik, termasuk pihak lain yang memiliki kepentingan berseberangan, untuk dengan mudah mengubah citra menjadi negatif. Citra DPR RI yang positif mengandung arti kredibilitas Dewan di mata publik adalah baik (*credible*), mencakup kemampuan (*expertise*) DPR RI melaksanakan kerjanya dan kepercayaan (*trustworthy*) publik terhadap DPR RI.

Penutup

Proses pemilihan pimpinan DPR RI masuk dalam kajian masalah komunikasi politik. Kegiatan dan perilaku komunikator politik adalah pesan politik yang kemudian disebarluaskan oleh media massa. Namun sayangnya masyarakat sebagai komunikan politik tidak memiliki kesempatan untuk menyampaikan umpan baliknya, karena tidak tersedia mekanisme untuk itu. Umpan baliknya disalurkan melalui media massa dan interaksi melalui media sosial, sehingga *tone* pesan

umpan baliknya lebih banyak berupa kritikan, sindiran, kekecewaan meskipun ada juga kekaguman.

Kegiatan pemilihan pimpinan DPR RI menjadi bentuk praktek komunikasi satu arah yang berpotensi menyebabkan terbentuknya persepsi negatif masyarakat terhadap keseluruhan kegiatan proses pemilihan pimpinan DPR RI. Citra politik DPR RI baik secara kelembagaan maupun anggota DPR RI menjadi semakin menurun karena hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap DPR RI sebagai lembaga perwakilan.

Perlu upaya yang sistematis untuk membangun kembali citra politik DPR RI yang intinya adalah selalu membangun dan menyediakan mekanisme terbangunnya komunikasi dua arah antara DPR RI dengan masyarakat. Meningkatkan kredibilitas komunikator politik melalui peningkatan kinerja Dewan adalah aspek penting dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan ini. Pesan politik yang dihasilkan komunikator politik adalah benar-benar pesan politik yang sesuai dengan harapan atau kebutuhan masyarakat yang diwakilinya. Konsistensi Dewan untuk selalu menjaga kinerjanya dengan baik adalah upaya yang signifikan untuk tetap menjaga citra lembaga perwakilan karena dibangun berdasarkan persepsi masyarakat yang didasarkan pada realitas yang terjadi.

Referensi

- Anwar Arifin, Komunikasi Politik Paradigma-Teori-Aplikasi-Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia, Jakarta: PT Balai Pustaka, 2003.
- Mahi M Hikmat, Komunikasi Politik Teori dan Praktek, Bandung: Ramadja Rosda Karya, 2010.
- Silih Agung Wasesa, Strategi Public Relations, Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Rhenald Kasali, Manajemen Public Relations Konsep dan Aplikasi di Indonesia, Jakarta: Penerbit Grafiti, 2005
- Rachmat Kriyantono, Public Relations Writing Media Public Relations Membangun Citra Korporat, Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Suara Pembaruan, 2/10/2014
- Rakyat Merdeka, 2-3/10/2014
- Media Indonesia, 2/10/2014
- <http://www.gatra.com/nusantara-1/nasional-1/71791-pkb-nilai-pimpinan-dpr-ri-periode-2014-2019-tidak-sah.html>, diakses tanggal 14/10/2014
- "Adian Napitupulu: Jika Saja Ibu Popon Mau Memberi Waktu", <http://www.tribunnews.com/nasional/2014/10/02/adian-napitupulu-jika-saja-ibu-popon-mau-mmemberi-waktu>, diakses tanggal 14/10/2014.